Sunda Empire dan Tantangan terhadap Nilai Historis Pancasila: Studi Kasus Disintegrasi Simbolik

Debora Rehulina BR Barus¹, Ratna Endang W², Berlyan Henry Ramadhan³, Amanda Trinisa Amalia⁴, Chevin Restuminardi⁵, Nurul Pujiana⁶

¹Ekonomi Pembangunan, FEB, Universitas Jember dan <u>berlyanhenry110@gmail.com</u>

- ² Akuntansi, FEB, Universitas Jember dan <u>amandatrinisaamalia@gmail.com</u>
- ³ Akuntansi, FEB, Universitas Jember dan <u>deborarehulina.barus@gmail.com</u>
- ⁴ Ilmu Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Jember dan chevinsr@gmail.com
- ⁵ Ilmu Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Jember dan <u>ananurul1803@gmail.com</u>

Article Info

Article history:

Received Sep, 2025 Revised Sep, 2025 Accepted Sep, 2025

Kata Kunci:

Sunda Empire, Pancasila, Disinformasi, Historis, Disintegrasi Simbolik

Keywords:

Sunda Empire, Pancasila, Disinformation, Historical, Symbolic Disintegration

ABSTRAK

Kemunculan Sunda Empire sebagai fenomena kontroversial di Indonesia menarik perhatian publik karena menyampaikan klaimklaim yang tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan masyarakat serta mengganggu fondasi ideologi negara. Artikel ini mengulas Sunda Empire sebagai contoh kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, dengan pendekatan historis, sosial, dan hukum. Kajian ini menyoroti tokoh-tokoh utama, struktur organisasi fiktif, serta narasi pseudo-sejarah yang dibangun kelompok ini, dan bagaimana aktivitas mereka bertentangan dengan kelima sila dalam Pancasila. Tindakan mereka mencakup penyebaran informasi palsu, manipulasi opini publik, serta penyalahgunaan simbol-simbol nasional. Artikel ini juga membahas respons masyarakat dan pemerintah, termasuk proses hukum terhadap para pemimpinnya. Penelitian ini menekankan pentingnya literasi ideologis dan ketegasan hukum sebagai langkah untuk melawan disinformasi serta menjaga persatuan bangsa. Penguatan nilai-nilai Pancasila dipandang sebagai kunci dalam mempertahankan identitas nasional dari ancaman ideologi fiktif.

ABSTRACT

The emergence of the Sunda Empire as a controversial phenomenon in Indonesia has attracted public attention because it makes baseless claims that have the potential to mislead the public and undermine the ideological foundations of the state. This article reviews the Sunda Empire as a case study of deviation from the values of Pancasila, using historical, social, and legal approaches. This study highlights the key figures, the fictitious organizational structure, and the pseudohistorical narrative constructed by this group, as well as how their activities contradict the five principles of Pancasila. Their actions include the dissemination of false information, manipulation of public opinion, and misuse of national symbols. This article also discusses the response of the public and the government, including the legal proceedings against its leaders. This research emphasizes the importance of ideological literacy and legal firmness as steps to counter disinformation and maintain national unity. Strengthening the values of Pancasila is seen as key to preserving national identity from the threat of fictional ideologies.

This is an open access article under the <u>CC BY-SA</u> license.



Corresponding Author:

nasional.

Name: Debora Rehulina BR Barus Institution: Universitas Jember Email: berlyanhenry110@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini berjudul "Sunda Empire dan Tantangan terhadap Nilai Historis Pancasila: Studi Kasus Disentegrasi Simbolik" dalam penelitian ini akan membahas berbagai hal tentang Sunda Empire dari berbagai perspektif. Sunda Empire memang mencoba mengaitkan dirinya dengan nilai-nilai historis dan simbol kebesaran masa lalu seperti penggunaan nama "Sunda", referensi pada kejayaan masa lalu, simbol dan seremoni. Namun pendekatan mereka lebih bersifat fiktif dan tidak berbasis pada metode sejarah ilmiah. sedangkan, nilai historis Pancasila adalah peristiwa dan sejarah yang terjadi pada masa kondisi Indonesia sebelum kemerdekaan dan juga menjadi dasar bagi pengembangan dan pemahaman tentang Pancasila yang terhubung dengan salah satu sila di Pancasila adalah sila ke - 3 "Persatuan Indonesia" dikarenakan cerminan langsung dari pengalaman historis bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun identitas

Kekaisaran Sunda adalah sebuah asosiasi yang berlandaskan pada romantisme Menurut sejarahnya didirikan oleh Lord Rangga Edi Raharjo di Brebes, Jawa Tengah. Mereka mengaku sebagai sebuah kerajaan besar antara bumi dan matahari. Gerakan ini awalnya hanya dimulai di media sosial tetapi akhirnya menjadi kenyataan dan menjadi viral. Setelah akun Facebook anggota Sunda Empire Renny Khairani Miller mengunggah status yang mengejutkan pengguna Facebook. Saat mengunggah Dalam artikelnya ini, ia membahas tentang keberadaan Kekaisaran Sunda dengan melampirkan beberapa foto orang-orangnya. Orang-orang berseragam militer.

Gerakan ini sudah ada sejak 2017 tetapi baru mulai muncul ke permukaan. Munculnya salah satu anggota kelompok yang diduga pelaku sempat membuat heboh Unggah ke dunia virtual melalui statusnya. Meskipun departemen ini sudah berdiri sejak lama, namun pimpinan departemennya masih Kepala Kantor Kesbangpol Kota Bandung, Ferdi Ligaswara, menjelaskan, Kerajaan Sunda Tidak terdaftar sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Bandung. Hal ini diperkuat oleh faktor-faktor berikut: Penunjukan tersebut dikukuhkan oleh Direktur Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Soni Bakhtiar, Kamis, 16 Januari 2020. Sunda Empire juga tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat. Hal ini dapat memunculkan satu konflik yang dapat berdampak luas terhadap persatuan bangsa adalah disintegrasi bangsa. konflik ini umumnya muncul ketika simbol - simbol atau representasi budaya, nilai, norma yang digunakan untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat mulai hilang dan menjadi kontroversial, sehingga dapat mengancam kesatuan bangsa.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji konflik disintegrasi simbolik pada bangsa Indonesia serta menganalisis peran konflik disintegrasi simbolik dalam kesatuan bangsa Indonesia, secara khusus artikel ini berusaha memahami sejauh mana konflik disentegrasi simbolik dapat memperburuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik disintegrasi simbolik bangsa, memiliki potensi besar yang sering kali berujung pada terjadinya perpecahan sosial, serta dapat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Peluang terjadinya disintegrasi simbolik sangat dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu subjek dan objek konflik, serta kebijakan pemerintah. subjek konflik melibatkan berbagai kelompok masyarakat seperti masyarakat yang minimnya literasi, penggunaan bahasa provokatif, labeling, dan stigmatisasi dapat menciptakan ketegangan dan memicu perpecahan dalam masyarakat. sementara objek konflik umumnya adalah nilai - nilai, simbol, dan makna yang dipertaruhkan dalam masyarakat. Kebijakan pemerintah yang terlambat dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesatuan simbolik dan ketidakmampuan dalam mengatasi konflik yang mungkin timbul.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan dampaknya, konflik disintegrasi simbolik perlu mendapatkan perhatian serius dalam konteks kebijakan nasional. Pemerintah perlu mengembangkan strategi komprehensif untuk mengelola konflik disintegrasi simbolik seperti, peningkatan kesadaran, penegakan hukum dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya ini tidak hanya penting untuk mencegah disintegrasi simbolik bangsa, tetapi juga untuk memperkuat sistem keamanan nasional yang mampu menghadapi berbagai ancaman di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjudul "Sunda Empire dan Tantangan terhadap Nilai Historis Pancasila: Studi Kasus Disintegrasi Simbolik", yang bertujuan untuk mengkaji berbagai perspektif terkait keberadaan kelompok Sunda Empire. Kelompok ini berupaya mengaitkan dirinya dengan narasi sejarah dan simbol kejayaan masa lampau melalui penggunaan istilah "Sunda", serta referensi terhadap peradaban besar di masa lalu, yang ditunjukkan melalui simbolisme dan praktik seremoni. Namun demikian, pendekatan yang mereka gunakan lebih bersifat naratif-fiktif dan tidak dilandasi oleh metodologi sejarah ilmiah. Hal ini bertolak belakang dengan nilai historis Pancasila, yang merujuk pada kejadian-kejadian nyata dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Pancasila, khususnya sila ke-3 "Persatuan Indonesia", merepresentasikan pengalaman kolektif bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan sekaligus membangun identitas nasional yang inklusif

Sunda Empire berawal dari sekelompok individu yang memiliki keyakinan ideologis bahwa mereka merupakan bagian dari sebuah kekaisaran besar yang telah lama terlupakan dan diyakini berada di antara bumi dan matahari. Ideologi ini dipopulerkan oleh pendirinya, Lord Rangga Edi Raharjo, yang memulai gerakan ini dari Brebes, Jawa Tengah.

Fenomena Sunda Empire mulai menarik perhatian publik setelah sebuah unggahan di media sosial Facebook, yang diduga berasal dari salah satu anggotanya, menjadi viral. Dalam unggahan tersebut ditampilkan narasi mengenai eksistensi kelompok ini beserta dokumentasi foto anggota yang mengenakan seragam menyerupai militer. Meskipun diklaim telah berdiri sejak tahun 2017, otoritas resmi di tingkat daerah menegaskan tidak adanya keterkaitan antara kelompok tersebut dan pemerintah setempat. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, Ferdi Ligaswara, menyatakan bahwa Sunda Empire tidak memiliki status sebagai mitra

pemerintah daerah. Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kota Bandung, Soni Bakhtiar, yang pada tanggal 16 Januari 2020 menegaskan bahwa kelompok tersebut juga tidak terdaftar secara resmi sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayah Kota Bandung.

Hal ini dapat memunculkan satu konflik yang dapat berdampak luas terhadap persatuan bangsa adalah disintegrasi bangsa. konflik ini umumnya muncul ketika simbol - simbol atau representasi budaya, nilai, norma yang digunakan untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat mulai hilang dan menjadi kontroversial, sehingga dapat mengancam kesatuan bangsa. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji konflik disintegrasi simbolik pada bangsa Indonesia serta menganalisis peran konflik disintegrasi simbolik dalam kesatuan bangsa Indonesia, secara khusus artikel ini berusaha memahami sejauh mana konflik disentegrasi simbolik dapat memperburuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik disintegrasi simbolik bangsa, memiliki potensi besar yang sering kali berujung pada terjadinya perpecahan sosial, serta dapat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Peluang terjadinya disintegrasi simbolik sangat dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu subjek dan objek konflik, serta kebijakan pemerintah. subjek konflik melibatkan berbagai kelompok masyarakat seperti masyarakat yang minimnya literasi, penggunaan bahasa provokatif, labeling, dan stigmatisasi dapat menciptakan ketegangan dan memicu perpecahan dalam masyarakat. sementara objek konflik umumnya adalah nilai - nilai, simbol, dan makna yang dipertaruhkan dalam masyarakat. Kebijakan pemerintah yang terlambat dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesatuan simbolik dan ketidakmampuan dalam mengatasi konflik yang mungkin timbul.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan dampaknya, konflik disintegrasi simbolik perlu mendapatkan perhatian serius dalam konteks kebijakan nasional. Pemerintah perlu mengembangkan strategi komprehensif untuk mengelola konflik disintegrasi simbolik seperti, peningkatan kesadaran, penegakan hukum dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya ini tidak hanya penting untuk mencegah disintegrasi simbolik bangsa, tetapi juga untuk memperkuat sistem keamanan nasional yang mampu menghadapi berbagai ancaman di masa depan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui fenomena kemunculan Sunda Empire kaitannya dengan nilai historis pancasila. Pemikiran atau ide-ide Sunda Empire dianggap hanya halusinasi karena tidak masuk akal sama sekali tetapi Sunda Empire melakukan upaya secara berulang untuk meyakinkan masyarakat sehingga hal ini menimbulkan konflik disintegrasi simbolik di bangsa Indonesia. Konflik ini dapat memperburuk ketegangan sosial yang dapat memperdalam segregasi sosial. selain itu, konflik disintegrasi simbolik dapat menurunkan legitimasi pemerintah, menciptakan ketidakpercayaan masyarakat dan membuka peluang bagi gerakan separatis.

Terkait dengan landasan hukum yang berlaku di Indonesia, Sunda Empire telah melanggar berbagai masalah hukum seperti penyebaran informasi palsu, manipulasi opini publik, serta penyalahgunaan simbol-simbol nasional, sehingga Sunda Empire dapat dijerat dengan pasal berlapis. Salah satunya dijerat pasal 57 huruf d Undang - Undang 24 tahun 2009 tentang bendera,

bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan mengatur larangan menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang - Undang Dasar ini.

Penerapan pasal 57 huruf d Undang - Undang 24 tahun 2009 dapat dikenakan ancaman pidana 10 tahun. Dampak bagi penganut Sunda Empire ini bukan hanya saja membahayakan diri sendiri melainkan juga membangun rasa mendapatkan keuntungan dari adanya kerajaan yang tidak nyata ini karena masyarakat yang mengikuti kelompok Sunda Empire ini menginginkan mendapat sesuatu dengan cepat termasuk kesuksesan secara instan. Tidak hanya itu kerajaan Sunda Empire ini juga banyak mengajak dan mempengaruhi masyarakat untuk menjadi anggota dengan kondisi pendidikan yang relatif rendah karena mereka dianggap mudah dicuci otaknya.

Dalam konteks persatuan dan kesatuan nasional, konflik disintegrasi simbolik merupakan ancaman strategis karena melibatkan komponen penting negara, seperti masyarakat, interpretasi dan makna. Tetapi kelakuan Sunda Empire ini juga dapat digolongkan dalam tindakan makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaannya.

Pelanggaran Sunda Empire sebetulnya bermula pada media sosial ketika pengguna Facebook bernama Renny Khairani Miller yang diduga anggota Sunda Empire membagikan unggahan yang membuat geger para pengguna Facebook karena pada unggahan tersebut, ia menulis tentang keberadaan sunda empire dengan melampirkan beberapa foto orang yang menggunakan seragam militer. Hal-hal tersebut ditakutkan dapat memunculkan suatu fenomena konflik yang berdampak luas terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berupa disintegrasi bangsa jika dibiarkan begitu saja karena banyak sekali perbuatan Sunda Empire yang telah melampaui batas seperti munculnya klaim-klaim tidak berdasar, penyebaran informasi menyesatkan, serta penyalahgunaan simbol.

Dengan mempertimbangkan hasil analisis konflik disintegrasi simbolik, secara harfiah disintegarasi adalah terpecahnya suatu negara menjadi bagian-bagian yang terpisah. Fenomena tersebut, meski dipandang sebagai akibat dari gerakan separatis, sebenarnya bermula dari ketidakpuasan mendasar terhadap perlakuan pemerintah terhadap daerah atau kelompok minoritas. Permasalahan seperti otonomi daerah, keadilan sosial dan pembangunan yang tidak seimbang bisa menjadi pemicu gerakan ini. Lingkungan politik Indonesia saat ini penuh dengan konflik dan konflik menimbulkan kecenderungan disintegrasi.

Salah satu dari beberapa pelanggaran hukum Sunda Empire yang dapat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia adalah Sunda Empire menggunakan berbagai simbol yang menyerupai lembaga resmi negara Indonesia sebagai upaya menciptakan citra legalitas yang sebenarnya tidak mereka miliki. Bermula pada saat Sunda Empire menggunakan atribut seperti bendera, lambang negara, dan dokumen yang menyerupai paspor, dengan desain yang menyerupai lembaga sah. Atribut ini digunakan dalam berbagai kegiatan internal mereka dan menjadi alat untuk memperkuat kesan otoritas palsu.

Penyebab disintegrasi simbolik yang dilakukan oleh Sunda Empire dapat terjadi dikarenakan faktor internal yaitu berkaitan dengan kualitas individu dalam suatu negara. Yang dapat memunculkan salah penafsiran atau pemahaman yang berujung pada sikap intoleran, lalu didukung iklim politik yang tidak sehat menyebabkan muncul nya perpecahan seperti demonstrasi dan konflik sosial yang sering terjadi akibat manipulasi politik. Oleh karena itu, menjaga keutuhan NKRI melalui pengelolaan konflik yang efektif adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat.

Meski berpotensi merugikan, Sunda Empire juga mencerminkan aspirasi tertentu yang patut dipahami:

3.1 Menghidupkan Kembali Budaya yang Mulai Terlupakan

Bagi sebagian orang, gerakan ini merupakan upaya mengangkat kembali nilai-nilai budaya lokal. Di tengah derasnya globalisasi, budaya Sunda dan tradisi Nusantara seringkali tenggelam. Sunda Empire, dalam hal ini, bisa dilihat sebagai simbol perlawanan terhadap erosi identitas, meski dilakukan dengan cara yang kontroversial.

3.2 Kritik Halus terhadap Ketimpangan Global

Gerakan ini juga dapat ditafsirkan sebagai sindiran terhadap ketidakadilan tatanan global, di mana negara-negara seperti Indonesia sering hanya menjadi penonton. Narasi "kerajaan baru" yang dibangun Sunda Empire seolah menawarkan alternatif: bagaimana jika Indonesia menjadi pusat peradaban dunia, bukan hanya pengikut?

3.3 Membangkitkan Kesadaran akan Kekuatan Bangsa

Di balik klaim yang dianggap tidak rasional, Sunda Empire sesungguhnya menyuarakan pentingnya menyadari potensi bangsa—mulai dari posisi geostrategis, sumber daya alam, hingga keragaman budaya. Daripada dijadikan bahan lelucon, semangat ini bisa menjadi pemicu kebangkitan nasional.

3.4 Pelarian Imajinatif dari Realitas yang Membosankan

Banyak masyarakat lelah dengan stagnasi politik dan ekonomi. Sunda Empire, dalam hal ini, menjadi pelarian imajinatif yang menawarkan harapan meski dalam bentuk fiksi dan simbolisme. Ide-ide besar sering lahir dari mimpi yang awalnya dianggap mustahil. Walaupun demikian, Sunda Empire tetap dinyatakan bersalah akibat masalah disintegrasi simbolik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Upaya Penyelesaian masalah disintegrasi simbolik pada bangsa Indonesia beberapa langkah penting yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia agar dapat mencegah hal ini agar tidak terulang kembali:

a. Edukasi dan Penyuluhan

Beragam lembaga pemerintah bekerja sama dengan unsur masyarakat dalam menyebarkan informasi dan memberikan penyuluhan kepada publik mengenai bahaya dari kelompok-kelompok yang mengaku sebagai kerajaan atau kekaisaran tanpa dasar hukum yang sah. Melalui berbagai saluran komunikasi, masyarakat diajak untuk bersikap kritis dan tidak mudah percaya terhadap narasi yang tidak masuk akal atau tidak memiliki dasar sejarah yang valid.

b. Pemantauan Serta Penindakan Terhadap Organisasi Ilegal

Aparat keamanan, termasuk TNI dan instansi terkait lainnya, secara aktif mengawasi kelompok-kelompok yang dianggap menyesatkan. Jika terbukti melanggar hukum, maka organisasi tersebut akan dibubarkan sesuai ketentuan demi menjaga ketertiban umum.

c. Peningkatan pengawasan

Langkah pengawasan diperkuat terhadap aktivitas kelompok serupa untuk mencegah penyebaran ajaran atau klaim yang tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi merugikan masyarakat.

d. Ajakan kepada masyarakat untuk melaporkan

Warga masyarakat dihimbau untuk turut serta berperan aktif dengan melaporkan keberadaan organisasi mencurigakan atau kegiatan yang bertentangan dengan hukum kepada aparat yang berwenang.

4. KESIMPULAN

Konflik disintegrasi simbolik pada bangsa Indonesia merupakan ancaman serius yang dapat merusak persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fenomena ini disebabkan oleh faktor internal dan politik yang tidak sehat. Sunda Empire merupakan salah satu organisasi yang tidak resmi yang mencoba untuk memecah persatuan dan kesatuan dengan adanya membuat konflik disintegrasi simbolik, hal tersebut membuat ancaman disintegrasi semakin nyata namun Sunda Empire juga mencerminkan aspirasi seperti menghidupkan kembali budaya yang telah terlupakan. Mengatasi ancaman disintegrasi simbolik memerlukan langkah - langkah strategis seperti penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, mendukung proses rekonsiliasi antargolongan, serta menjaga keadilan dan persatuan di seluruh Indonesia. Upaya mengatasi permasalahan keruntuhan negara harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah saja, namun juga seluruh individu. Dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan sebagai kekuatan, bukan kelemahan akan membuat Indonesia bisa tetap bersatu dan kohesif.

DAFTAR PUSTAKA

Antara Jabar. (2020, October 27). Hakim vonis tiga petinggi Sunda Empire pidana penjara dua tahun. Antaranews.com.

Bablast. (2025, May 12). Mengapa Sunda Empire perlu dibangun? Ini alasan dan harapan di baliknya Bablast.id. BenarNews. (2020, October 27). Pengadilan vonis petinggi Sunda Empire dua tahun penjara. BenarNews.org. Bunda Media Grup. (2021). Sejarah Pancasila sebagai salah satu awal sejarah hukum di Indonesia. Jurnal Iuris, 1(1), 1–10.

Hanifah, N., & Wibowo, A. (2023). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter siswa di era digital. J-CEKI (Jurnal Cendekia Ilmiah), 3(1), 45–54.

Prasetyo, H. (2022). Implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa pada siswa sekolah dasar. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(2), 110–118.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. (2023). Maqam Sunda Empire: The great of the Sunda Empire.